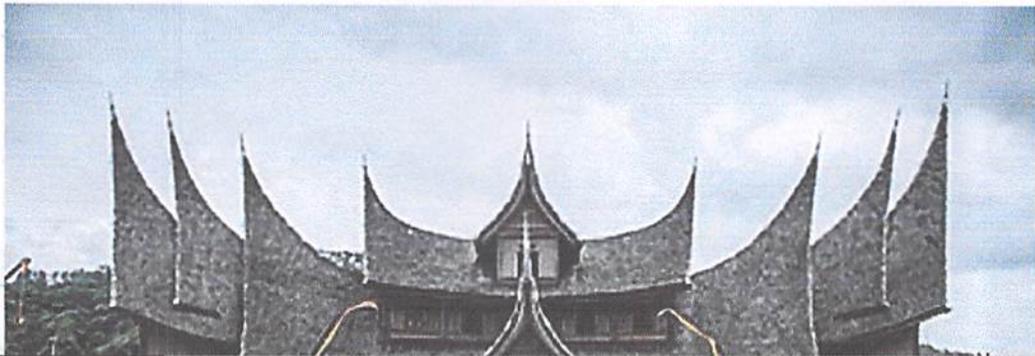


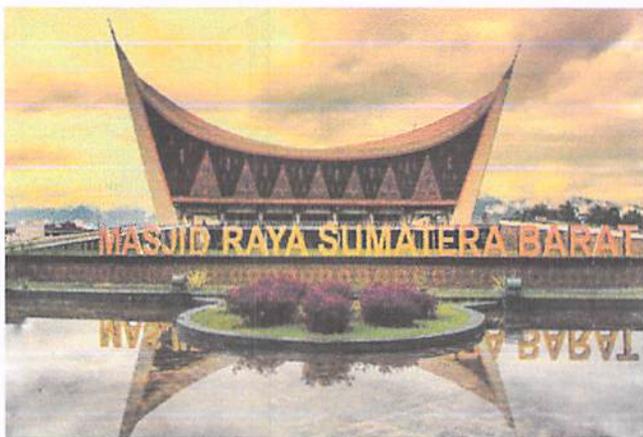


1/31/2020



LAPORAN  
KINERJA  
TAHUN  
2019

BIRO KERIASAMA, PEMBANGUNAN &  
RANTAU



## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2019. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2019 dan merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa kualitas laporan ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen seluruh pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam

---

mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Selain itu target indikator kinerja yang ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2019 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, 15 Januari 2020  
**KEPALA BIRO KERJASAMA,  
PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

**Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19701006 198908 1 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini merupakan bentuk akntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setoap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran organisasi.

Memenuhi maksud tersebut diatas Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 yaang merupakan penerapan tahun keempat dari Renstra Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini disusun untuk mewujudkan kewajiban Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2019 menunjukkan keberhasilan yang baik artinya tugas pokok dan fungsi Biro telah dapat terselenggarakan sebagaimana mestinya.
  2. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja amat baik dan baik, dan telah sesuai dengan klasifikasi penilaian yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing sasaran strategis masing-masing yaitu :
    - a) Sasaran 1, Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
      - Indikator Sasaran 1 rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 556%
      - Indikator Sasaran 1 rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 133,3%
    - b) Sasaran 2 , Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ( $\geq 90\%$ ) F dengan rata-rata capaian indikator kinerja 100,5%
-

- c) Sasaran 3, Meningkatnya tata kelola organisasi dengan rata-rata capaian indikator kinerja 102%
3. Informasi kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini agar dijadikan bahan untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran umum Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.....	1
1.2 Permasalahan Utama.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja .....	22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	24
3.3 Capaian Kinerja Organisasi .....	25
3.4 Realisasi Anggaran .....	34
BAB IV PENUTUP .....	37
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Permasalahan dan Kendala .....	38

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 .....	7
Tabel 1.2 .....	9
Tabel 2.1 .....	20
Tabel 2.2 .....	20
Tabel 3.1.1 .....	24
Tabel 3.2.1 .....	24
Tabel 3.3.1.a .....	26
Tabel 3.3.1.b .....	27
Tabel 3.3.1.c .....	28
Tabel 3.3.2.a .....	30
Tabel 3.3.2.b .....	31
Tabel 3.3.3.a .....	32
Tabel 3.3.3.b .....	32
Tabel 3.4.1 .....	34

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 .....	8
Grafik 3.1 .....	36
Grafik 3.2 .....	36

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau .....	6

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN UMUM BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau atau Biro KPdR adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah dibidang kerjasama, pengendalian pembangunan dan pembinaan ranah dan rantau. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, sebagaimana instansi pemerintahan lainnya, dimana salah wujud dari azas penyelenggaraan *good governance* maka Biro KPdR wajib membuat dan menyajikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap tahun. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan amanah Peraturan perundangan berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sementara tujuan dari penyusunan LAKIP Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai

sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat.

### **1.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan tugas pokok Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu "*menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau*".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **a. Tugas**

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau.

#### **b. Fungsi**

- 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
- 2) Merumuskan pedoman, kebijakan penyelenggaraan kerjasama Daerah, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan ranah dan rantau;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama Daerah di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota

- 4) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengendalian percepatan pembangunan di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pemberdayaan ranah dan rantau khususnya dibidang sosial budaya dan ekonomi;
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan jaringan komunikasi ranah dan rantau khususnya dibidang social budaya dan ekonomi;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama ranah dengan rantau;
- 8) Menyelenggarakan analisis dan pertimbangan guna penerbitan rekomendasi bagi pejabat/ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kerjasama ataupun berkunjung ke Luar Negeri;
- 9) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah;
- 10) Menyelenggarakan pengendalian percepatan, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis pembangunan daerah dan Nasional meliputi pembangunan fisik, perekonomian, social budaya, dan pemerintahan termasuk juga program strategis Kabupaten/Kota
- 11) Merumuskan dan menyelenggarakan upaya percepatan pembangunan khususnya untuk program strategis Daerah melalui penyediaan system reward dan punish;
- 12) Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (Renstra), LAKIP, LKPJ dan LPPD Biro;
- 13) Menyelenggarakan tugas penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

### 1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

1. **Bagian Rantau**, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan program dan kegiatan Rantau. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Rantau terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau;
  - b. Sub Bagian Bina Ekonomi Ranah dan Rantau; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha.
  
2. **Bagian Pembangunan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan, serta perumusan dan penyediaan data dan pelaporan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Pengendalian Data;
  - b. Sub Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya; dan
  - c. Sub Bagian Infrastruktur dan Kewilayahan.

3. **Bagian Kerjasama Daerah**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan merumuskan kerjasama daerah, fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah dan pengkajian bahan kebijakan daerah, pemantauan, dan evaluasi kebijakan kerjasama luar daerah dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kerjasama Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
- b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan
- c. Sub Bagian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 (Berdasarkan Peraturan Gubernur SUMBAR Nomor 69 Tahun 2017)



### 1.1.3 SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

#### A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2019, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 29 orang yang terdiri atas 12 orang struktural, 16 orang fungsional umum, 1 orang fungsional tertentu. Selain itu Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dibantu dengan 1 orang PTT dan 3 orang pegawai sukarela. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 1.1.**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019**

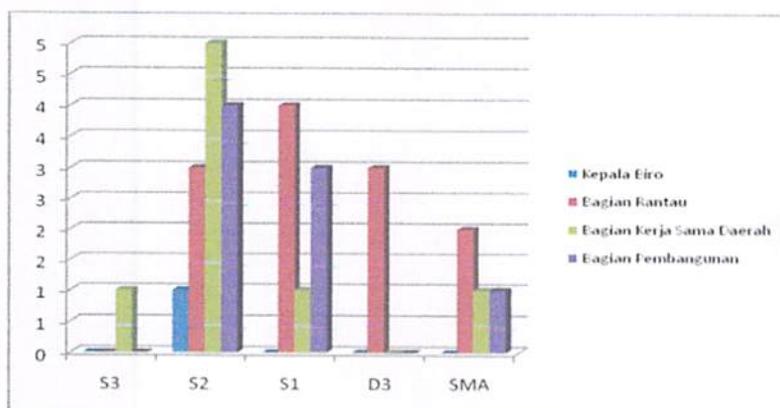
No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro		1					
2.	Bagian Rantau		2	4	3	2		
3.	Bagian Kerjasama Daerah	1	5	2		2		
4.	Bagian Pembangunan		4	3		1		
	JUMLAH	1	12	9	3	5	0	30

Sumber : Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2019 pegawai di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat

3,33 % tingkat pendidikannya adalah S3 atau sebanyak 1 orang, 40 % berpendidikan S2 atau sebanyak 12 orang, 30 % berpendidikan S1 atau sebanyak 9 orang, 10 % berpendidikan D3 atau sebanyak 3 orang dan 3.33 % berpendidikan SMU atau sebanyak 5 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1.1.  
Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2018



## B. Aset

Aset yang diserahkan pengelolaannya kepada Biro KPdR untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau per 31 Desember 2019 tercatat sebagaimana berikut.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Aset Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau**  
**Per 31 Desember 2019**

NO	NAMA	MERK /MODEL	TIPE	UKURAN/CC	TAHUN PEROLEHAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil	Toyota	Inova Diesel V	2494	2015	309,870,000	1	309,870,000	38,733,750	193,668,750	116,201,250
2	Mobil	Kijang INNOVA	-	1998 CC	2011	256,547,000	1	256,547,000	-	256,547,000	-
3	Scanner	Fujitsu	-	-	2018	4,700,000	2	9,400,000	1,880,000	3,760,000	5,640,000
4	Mesin ketik Besar	Express	-	-	1995	1,069,000	1	1,069,000	-	1,069,000	-
5	Mesin Tik Listrik	Brother	GX6750	-	2017	2,680,000	1	2,680,000	536,000	1,608,000	1,072,000
6	Mesin Fotocopy	Samsung	K2200 ND	-	2017	24,300,000	1	24,300,000	4,860,000	14,580,000	9,720,000
7	Lemari Besi	President	-	-	2004	634,500	2	1,269,000	-	1,269,000	-
8	Almari	Lion	-	-	2014	4,450,000	1	4,450,000	-	4,450,000	-
9	Lemari Arsip	Storage selving 9040183 White	-	90x40183	2018	17,900,000	1	17,900,000	3,580,000	7,160,000	10,740,000
10	Filling Besi	Mustang	-	-	2004	385,000	1	385,000	-	385,000	-
11	Brankas Besi	President	-	-	1995	1,510,500	2	3,021,000	-	3,021,000	-
12	Mesin Penghancur Kertas	ZSA Shredder	-	-	2017	3,500,000	1	3,500,000	700,000	2,100,000	1,400,000
13	Lemari Arsip/Loker	-	-	-	2018	19,000,000	1	19,000,000	3,800,000	7,600,000	11,400,000
14	Lemari Arsip/Loker	-	-	-	2018	19,000,000	2	38,000,000	7,600,000	15,200,000	22,800,000
15	Lemari Kayu Ruang Kabag	-	-	-	2018	11,800,000	1	11,800,000	2,360,000	4,720,000	7,080,000
16	Lemari Arsip/Loker	-	-	-	2018	19,000,000	2	38,000,000	7,600,000	15,200,000	22,800,000
17	Lemari Kayu Ruang Kabag	-	-	-	2018	11,800,000	1	11,800,000	2,360,000	4,720,000	7,080,000
18	Lemari Kayu Ruang Kabag	-	-	-	2018	11,800,000	1	11,800,000	2,360,000	4,720,000	7,080,000
19	Lemari Kayu Ruang Kepala Biro	-	-	-	2018	14,400,000	1	14,400,000	2,880,000	5,760,000	8,640,000
20	Meja Bendahara	Arkadia	-	140x70x75	2017	2,100,000	1	2,100,000	420,000	1,260,000	840,000
21	Meja Panjang	-	-	200x100x75	2017	10,000,000	1	10,000,000	2,000,000	6,000,000	4,000,000
22	Meja Kerja Sekretaris	Arkadia	-	140x70x75	2017	2,900,000	1	2,900,000	580,000	1,740,000	1,160,000
23	Meja Kerja Kasubag	Arkadia	Type D	140x70x75	2017	4,250,000	1	4,250,000	850,000	2,550,000	1,700,000

24	Meja Kerja Staf	Arkadia	Type A	120x60 x76	2017	21,175,000	5	105,875,000	21,175,000	63,525,000	42,350,000
25	Meja Kayu Biro	-	-	-	2005	385,667	2	771,333	-	771,333	-
26	Meja Kayu Biro	-	-	-	2005	385,667	1	385,667	-	385,667	-
27	Meja Kerja Kasubag	Arkadia	Type C	140x70 x75	2017	10,500,000	4	42,000,000	8,400,000	25,200,000	16,800,000
28	Meja Bundar	-	-	d 130cm	2018	6,000,000	1	6,000,000	1,200,000	2,400,000	3,600,000
29	Meja Bulat	-	-	d 150cm	2018	3,600,000	2	7,200,000	1,440,000	2,880,000	4,320,000
30	Kursi Meja Bundar	Informa	-	d 130cm	2018	1,700,000	4	6,800,000	1,360,000	2,720,000	4,080,000
31	Kursi Meja Bulat	Informa	-	d 150cm	2018	1,700,000	8	13,600,000	2,720,000	5,440,000	8,160,000
32	Meja Rapat	-	-	-	2006	7,150,000	2	14,300,000	-	14,300,000	-
33	Meja Meeting	Easy Meeting Table	EE78.3 0.RO	1.3x12 0x76	2018	14,950,000	1	14,950,000	2,990,000	5,980,000	8,970,000
34	Meja Receptionis	Montana	Desk Left (U/2)	240x65 x105	2018	4,970,000	1	4,970,000	994,000	1,988,000	2,982,000
35	Meja Kepala Biro	Montana	MGR DESK 1809	200x18 7x77	2018	13,000,000	1	13,000,000	2,600,000	5,200,000	7,800,000
36	Kursi Rapat	Informa	-	-	2018	3,200,000	10	32,000,000	6,400,000	12,800,000	19,200,000
37	Kursi Rapat Undangan	-	-	-	2011	1,199,000	2	2,398,000	-	2,398,000	-
38	Kursi Rapat	-	-	-	2014	495,000	11	5,445,000	-	5,445,000	-
39	Sofa Tamu	Kenway sofa dan myria table	STK081 7-15	-	2018	14,700,000	1	14,700,000	2,940,000	5,880,000	8,820,000
40	Kulkas	Panasonic	NR-BB238 G-K	-	2018	4,365,000	1	4,365,000	873,000	1,746,000	2,619,000
41	Microwave	Panasonic	NN-GT35H MTTE	-	2018	1,595,000	1	1,595,000	319,000	638,000	957,000
42	Televisi	Sharp	LC-50LE27 5X	-	2015	12,650,000	1	12,650,000	2,530,000	12,650,000	-
43	TV LED	Samsung	UHD SmartTV	43 Inch	2017	8,445,000	1	8,445,000	1,689,000	5,067,000	3,378,000
44	TV LED	Samsung	UHD SmartTV	43 Inch	2017	8,445,000	1	8,445,000	1,689,000	5,067,000	3,378,000
45	CPU	SIM	-	-	2009	4,800,000	1	4,800,000	-	4,800,000	-
46	Kamera	Canon	EOS80 D	-	2017	22,300,000	1	22,300,000	4,460,000	13,380,000	8,920,000
47	Kamera Digital	Canon	700 D	-	2015	9,515,000	1	9,515,000	1,903,000	9,515,000	-
48	Kamera Digital	Canon	-	-	2008	3,500,000	1	3,500,000	-	3,500,000	-
49	Dispenser	Sharp	SWD-73EHL-BK	-	2018	2,915,000	1	2,915,000	583,000	1,166,000	1,749,000
50	Skat Pengaman TV	-	-	-	2016	2,600,000	1	2,600,000	520,000	2,080,000	520,000
51	PC All In One	Lenovo	FOCM	-	2017	14,510,000	12	174,120,000	43,530,000	130,590,000	43,530,000
52	Komputer PC	H52OE DC	-	-	2016	10,285,000	1	10,285,000	2,571,250	10,285,000	-

53	Komputer PC	-	-	-	2008	8,980,000	1	8,980,000	-	8,980,000	-
54	Komputer PC	Lenovo H52OE DC	-	-	2015	8,140,000	1	8,140,000	-	8,140,000	-
55	PC All In One	LENOVO	AIO 520-241KL	-	2018	14,850,000	3	44,550,000	11,137,500	22,275,000	22,275,000
56	PC All In One	Lenovo	520-24ICB	-	2018	15,300,000	9	137,700,000	34,425,000	68,850,000	68,850,000
57	Laptop	Lenovo	-	-	2014	8,745,000	1	8,745,000	-	8,745,000	-
58	Laptop	Lenovo	-	-	2014	8,745,000	1	8,745,000	-	8,745,000	-
59	Laptop	HP	-	-	2016	8,459,000	1	8,459,000	2,114,750	8,459,000	-
60	Laptop	LENOVO	-	MIX 510	2018	14,900,000	1	14,900,000	3,725,000	7,450,000	7,450,000
61	Laptop	Aser	-	-	2010	9,380,000	1	9,380,000	-	9,380,000	-
62	Laptop	Lenovo	Yoga 520	-	2018	12,900,000	4	51,600,000	12,900,000	25,800,000	25,800,000
63	Printer	HPLJ 1020	-	-	2007	1,500,000	1	1,500,000	-	1,500,000	-
64	Printer	HP LJ1020	-	-	2007	1,500,000	1	1,500,000	-	1,500,000	-
65	Printer Warna	Epson	L385	-	2017	3,000,000	3	9,000,000	2,250,000	6,750,000	2,250,000
66	Printer	HP PRD 400 M40IN	-	-	2015	4,950,000	1	4,950,000	-	4,950,000	-
67	Printer	Epson L310	-	-	2015	2,282,500	1	2,282,500	-	2,282,500	-
68	Printer Dot Matrik	Epson	LX310	-	2017	2,350,000	3	7,050,000	1,762,500	5,287,500	1,762,500
69	Printer	HP Laser Jet	P1006	-	2009	1,815,000	1	1,815,000	-	1,815,000	-
70	Monitor	Samsung Flat	-	-	2006	1,230,000	1	1,230,000	-	1,230,000	-
71	Server	Lenovo	SR 550	-	2018	92,000,000	1	92,000,000	23,000,000	46,000,000	46,000,000
72	MEJA KABAG	Montana	-	160x150x75	2018	9,950,000	1	9,950,000	1,990,000	3,980,000	5,970,000
73	MEJA KABAG	Montana	Desk 1607	160x150	2018	9,950,000	1	9,950,000	1,990,000	3,980,000	5,970,000
74	MEJA KABAG	Montana	Desk 1607	160x150x75	2018	9,950,000	1	9,950,000	1,990,000	3,980,000	5,970,000
75	Kursi Kepala Biro	Informa	Black High (F)	-	2018	7,950,000	1	7,950,000	1,590,000	3,180,000	4,770,000
76	Kursi Kabag	Informa	Black High	-	2018	4,950,000	1	4,950,000	990,000	1,980,000	2,970,000
77	Kursi Kabag	Informa	Black High	-	2018	4,950,000	1	4,950,000	990,000	1,980,000	2,970,000
78	Kursi Kabag	Informa	Black High	-	2018	4,950,000	1	4,950,000	990,000	1,980,000	2,970,000
79	Kursi Kasubag	Informa	Black	-	2018	2,480,000	9	22,320,000	4,464,000	8,928,000	13,392,000
80	Kursi Kerja Staf Ahli	-	-	-	2011	2,539,500	2	5,079,000	-	5,079,000	-
81	Kursi Hadap Kepala Biro	Roes 163 Visitor Chair	Black	-	2018	1,450,000	2	2,900,000	580,000	1,160,000	1,740,000
82	Kursi Hadap Kabag	Savello	-	-	2018	2,200,000	2	4,400,000	880,000	1,760,000	2,640,000
83	Kursi Hadap Kabag	Savello	-	-	2018	2,200,000	2	4,400,000	880,000	1,760,000	2,640,000
84	Kursi Hadap Kabag	Savello	-	-	2018	2,200,000	2	4,400,000	880,000	1,760,000	2,640,000

85	Kursi Hadap Kasubag	Informa	-	-	2018	2,200,000	10	22,000,000	4,400,000	8,800,000	13,200,000
86	Kursi Ruang Tunggu	-	-	-	2016	6,435,000	1	6,435,000	1,287,000	5,148,000	1,287,000
87	Proyektor Multi	Thosiba	-	-	2008	17,875,500	1	17,875,500	-	17,875,500	-
88	Proyektor Multi	Sony	-	-	2015	17,800,000	1	17,800,000	3,560,000	17,800,000	-
89	Layar Proyektor	-	-	-	2014	2,475,000	1	2,475,000	-	2,475,000	-
90	UPS	UPS ICA 1600 VA/800W	-	-	2015	7,700,000	1	7,700,000	1,540,000	7,700,000	-
91	Projector/Infocus	BenQ W1090	-	-	2018	15,200,000	1	15,200,000	3,040,000	6,080,000	9,120,000
92	Pesawat Telepon	Panasonic	-	-	2012	475,000	1	475,000	-	475,000	-
93	Mesin Fax	Brother	MFCL2740DW	-	2017	4,000,000	1	4,000,000	800,000	2,400,000	1,600,000

## 1.2 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama Biro KPdR Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dijelas sebagai berikut :

### 1.2.1 Dalah Hal Kinerja Bagian Kerjasama

- A. Belum adanya pemetaan (*mapping*) terkait potensi dan kebutuhan kerjasama Daerah, sehingga pelaksanaan kerjasama saat ini lebih kepada fasilitasi dan insidental;
- B. Kabupaten/Kota belum memahami arti pentingnya kerjasama Daerah dalam membangun Daerahnya, sehingga masih sulit untuk mengajak dan memprakarsai kerjasama antar Daerah;
- C. Masih belum adanya peraturan teknis ( Permendagri Baru turunan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, sehingga dalam pelaksanaan masih terdapat tumpang tindih dalam mencari acuan regulasi.
- D. Belum adanya Roadmap kerjasama Daerah.

### 1.2.2 Dalam Hal Kinerja Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan secara umum memiliki peran dan fungsi untuk mengendalikan bagaimana administrasi kegiatan dapat berjalan sebagaimana harusnya. Jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan oleh KPA dan atau PPTK tidak didukung dengan administrasi yang baik. Selanjutnya juga Bagian Pembangunan memiliki peran untuk mengawal bagaimana realisasi fisik dan keuangan kegiatan bisa mencapai lebih dari 90%. Bagian Pembangunan berperan untuk menjaga bagaimana jangan terjadi fenomena *bottleneck* dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian selama tahun 2019, Bagian Pembangunan dihadapkan kepada beberapa malah, yakni :

- A. Kurang tersedianya regulasi yang mengatur bagaimana pedoman pelaksanaan kegiatan oleh PA/KPA/PPTK.
- B. Belum semua SATKER (Pemerintah Pusat) yang terbuka dan melibatkan Biro KPdR dalam evaluasi capaian kinerja mereka, sehingga Biro KPdR baru bisa tahu adanya kebutuhan fasilitasi setelah masalah terjadi.
- C. Kurangnya jumlah SDM dan sarana mobilitas guna melakukan monitoring dan pendampingan di lapangan.
- D. Adanya tumpang tindih beberapa fungsi antara Biro KPdR dengan Bappeda khususnya terkait pengendalian kegiatan yang sumberdana dari APBN.

### 1.2.3 Dalam Hal Kinerja Bagian Rantau

Sasaran kegiatan pada bagian rantau lebih kepada bagaimana pelibatan peran serta perantau dalam pembangunan Sumatera Barat. Pada setiap acara pertemuan dengan perantau yang di fasilitasi oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau diupayakan bagaimana perantau

bisa tertarik dan mau berinvestasi di Sumatera Barat. Tidak hanya memberikan bantuan ke masyarakat kampung, akan tetapi juga bisa menjadi mitra dagang masyarakat Sumbar di Perantauan.

Untuk ini diupayakan tindaklanjut dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding ( MoU ) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Namun dalam pelaksanaan kerjasama dengan perantau minang ini terdapat permasalahan antara lain :

- A. Masih kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan sinergi pemerintahan dengan perantau.
- B. Masih kurangnya dukungan dari organisasi perantau di tingkat Nagari/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota dalam memberikan dukungan pembangunan di Nagari/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/Kota.
- C. Masih belum optimalnya peran Walinagari/Kepala Desa/Lurah serta masyarakat untuk mendukung kegiatan kerjasama dengan perantau minang.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2019 Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP.

### **2.1 PERENCANAAN STARTEGIS**

#### **2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021 yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat tahun 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum dan akan diselenggarakan serta menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021.

Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adt Basani Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.**

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

**2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.**

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

**3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.**

Misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

**4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan menata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

**5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.**

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kepada **Misi 2** yaitu "**Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Profesional**" dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

## 1. Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah :

- a. Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri;
- c. Terwujudnya naskah produk hokum Rencana Induk Kerjasama Daerah;
- d. Terwujudnya pembinaan bagi Pejabat Pengelola Kerjasama di Kabupaten/Kota dan di Provinsi
- e. Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi Ranah dan Rantau;
- f. Meningkatnya pembentukan dan pembinaan Nagari/Desa/Kelurahan hasil Binaan Kerjasama Rantau;
- g. Meningkatnya pengendalian terhadap kegiatan Sumatera Barat khususnya untuk serapan keuangan dan administrasi kegiatan;
- h. Meningkatnya pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan lintas sektor khususnya dalam encapai target 100 0 100 di Sumater Barat;
- i. Terlaksananya pengelolaan Simbangda Based Evidance dalam rangka mencapai target Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah.

## 2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan sebagai berikut :

**a. Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah**

Partisipasi pelaku pembangunan daerah dalam hal ini dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

- Partisipasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan fasilitasi Kerjasama Antar Daerah/Pihak Ketiga Dan Luar Negeri.
- Partisipasi Perantau dalam rangka meningkatkan Pembangunan Daerah dengan cara bagaimana perantau dapat meningkatkan pembangunan melalui Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dengan adanya partisipasi pelaku pembangunan diharapkan pembangunan di Sumatera Barat semakin meningkat.

**b. Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal**

Realisasi kegiatan pembangunan yang optimal sangat di perlukan sebagai bentuk tolak ukur terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Dimana realisasi pembangunan diukur dengan capaian realisasi fisik kegiatan dan capaian realisasi keuangan yang dicapai bagi seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dan juga capaian yang di capai oleh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

**c. Meningkatnya tata kelola organisasi**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan suatu tata kelola organisasi yang efektif dan efisien dimana memuat kebiakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Dengan telah diwujudkannyanya sasaran, dan sasaran strategis serta indikator kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau 2016-2021, maka Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berdasarkan Perubahan Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama</li> <li>• Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 MoU, 20 PKS dan 12 fasilitasi</li> <li>• 19 N/D/K dan 3 MoU</li> </ul>
2	Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ( ≥ 90% )	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	≥ 90 %
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	95%

Untuk Menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kinerjanya pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan penunjang ditetapkan dalam beberapa Program yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut

**Tabel 2.2**  
**Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	633.824.454
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	54.091.131
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	120.230.000
IV	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	351.799.160
V	KERJASAMA PEMBANGUNAN	2.036.882.197
VI	PENINGKATAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	435.081.000
J U M L A H		3.631.907.942

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi instansi dengan tujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodic memenuhi maksud tersebut untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2019. Hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai

dengan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja diperlukan data pendukung pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber internal dan eksternal, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. **Data Internal**, yaitu yang berasal dari sistem informasi yang ada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, dimana tingkat pengolahan data dilakukan pada level Bagian dan Sub Bagian serta staf yang berada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.
- b. **Data Eksternal**, yaitu data yang berasal dari stakeholder atau pihak-pihak diluar Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, yang didapatkan melalui :
  - 1) Fasilitasi, pembinaan dan supervisi dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota baik sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- 2) Rapat-rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur Forkompinda lingkup Pemerintah Provinsi;
- 3) Rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis/rapat dan pertemuan reguler Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Biro/ Bagian yang berwenang dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 4) Rapat kerja dan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas dalam rangka urusan penyelenggaraan pembuatan perjanjian kerjasama;
- 5) Rapat kerja dan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan sinergisitas antara Ranah dan Rantau;
- 6) Melakukan kunjungan secara langsung ke daerah dan Provinsi lain Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Kecamatan dan Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerjasama dan sinergisitas ranah dan rantau;
- 7) Laporan secara berkala dari instansi yang berkaitan dengan wewenang tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja

dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Hasil Capaian (%)	Kategori Penilaian
85 - < 100	Sangat berhasil
75 - < 84	Berhasil
56- < 74	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > 75 %.

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dapat dilihat pada tabel 3.2.1 berikut ini :

**Tabel 3.2.1**  
**Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2019**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi pelaku pembangunan daerah	1. Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	20 MoU, 20 PKS 12 fasilitasi	22 MoU, 30 PKS 169 fasilitasi	110 MoU 150 PKS 1.408 fasilitasi
			2. Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan	19 N/D/K 3 MoU	19 N/D/K 5 MoU	100 166,6
		2. Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ( ≥90%)	3. Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	≥ 90 %	95,37% fisik dan 92,03% keuangan.	100,5
2.	Meningkatnya kinerja organisasi	3. Meningkatkan tata kelola organisasi	4. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	95%	96,83%	102
<b>Jumlah Capaian .....</b>						2.137,1
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja .....</b>						305,3

Pada tabel 3.2.1 diatas dapat dilihat bawah target indikator kinerja 4 ( empat ) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 6 (enam ) indikator kinerja sebesar 305,3%.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawah capaian kinerja dapat diukur formula berikut ini :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi seluruh sasaran pendukung} \times 100 \%}{\text{Jumlah target}}$$

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi per sasaran strategis.

#### Sasaran Strategis 1

#### **MENINGKATNYA PARTISIPASI PELAKU PEMBANGUNAN DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Melalui asas desentralisasi kewenangan Pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai keharusan daerah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat terwujud sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya adalah “ bahwa daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya”, artinya daerah dituntut untuk mampu membangun kerjasama antar

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keuntungan negara.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan fasilitasi peninjauan hubungan kerjasama antara Bupati dan Walikota di Sumatera Barat melalui kesepakatan bersama tentang Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan. Selain itu juga melakukan peninjauan kerjasama dengan beberapa lembaga/pihak ketiga ( non Pemerintah). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan peninjauan dengan beberapa negara dalam rangka investasi, pertukaran budaya, pendidikan, jasa dan sebagainya.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan kegiatan kerjasama Perantau Minang dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat. Partisipasi perantau sangat mengapresiasi kegiatan ini selain menjalin hubungan silaturahmi dengan perantau, perantau juga dapat mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dan perantau memiliki satu sasaran strategis yaitu meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah yang dapat dilihat pada tabel 3.3.1

**Tabel 3.3.1.a**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	20 MoU, 20 PKS dan 12 fasilitasi	22MoU, 30PKS 169 fasilitasi	110 150 1.408
2.	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan	19 N/D/K 3 MoU	19 N/K/L 5Mou	100 166,6

Adapun formula yang digunakan untuk penghitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pelaku Pembangunan}}{\text{Jumlah Target Pelaku Pembangunan}} \times 100\%$$

Dari tabel 3.3.1.a dapat dilihat, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Partipasi Pelaku Pembangunan Daerah lebih 100%. Realisasi indikator partisipasi pelaku pembangunan daerah diukur berdasarkan hasil laporan jumlah partisipasi pelaku pembangunan.

Sedangkan perbandingan dengan kondisi tahun sebelumnya dapat diperoleh data sebagai berikut pada tabel 3.3.1.b :

**Tabel 3.3.1.b**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun 2019**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket. *
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	NA	30 MoU 24 PKS	20 MoU 20 PKS 12 Fasilitasi	20 MoU 32 PKS	22 MoU 30 PKS 169 Fasilitasi	66,67 133,33	110 150 1.408	
	Rata-rata 2019						100	556	
	Kriteria Penilaian	Sangat Berhasil							

\*Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan.

Dari tabel perbandingan target dan realisasi capaian kinerja 2018 dengan 2019 terjadi peningkatan dari capaian 100% menjadi 556% terhadap partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama. Ini membuktikan bahwa para OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kota maupun Lembaga dan Pihak Ketiga sudah mulai mengerti dan memahami perlunya dilakukan kerjasama setiap pekerjaan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Dengan kondisi tersebut akan dapat meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat.

Untuk perbandingan capaian Indikator Kinerja ke 2(dua) dari sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel 3.3.1.c

**Tabel 3.3.1.c**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun 2019**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket.*
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan	NA	19 N/D/K 3 MoU	19 N/D/K 3 MoU	17 N/D/K 3 MoU	19 N/D/K 5 MoU	89,47	100	
Rata-rata 2019							94,5	133,3	
Kriteria Penilaian		Sangat Berhasil							

\*Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan.

Pada tabel 3.3.1.c dapat dilihat hasil perbandingan target dan realisasi capaian kinerja indikator dari umlah partisipasi perantau dalam pembangunan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perantau dalam membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan semakin naik dari tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan sasaran strategi 1 program yang dilaksanakan adalah Program Kerjasama Pembangunan dengan Jumlah kegiatan 5 (lima) dimana 3 (tiga) kegiatan pada Bagian Kerjasama Daerah dan 2(dua) kegiatan untuk Bagian Rantau sebagai penunjang pencapaian target indikator kinerja sasaran jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A dengan jumlah anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Kerjasama Pembangunan			
1	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	Rp. 363.316.980,-	Rp. 343.545.247,-	94,56
2	Kerjasama Pihak Ketiga	Rp. 157.980.060,-	Rp. 157.121.498,-	99,46
3	Monititoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Rp. 941.144.880,-	Rp. 933.469.115,-	99,18
4	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	Rp. 370.828.748,-	Rp. 366.802.734,-	98,91
5	Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau	Rp. 203.611.529,-	Rp. 196.658.246,-	96,59

## **Sasaran Strategis 2**

### ***MEWUJUDKAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL (≥ 90%)***

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari berbagai pekerjaan baik dari sektor perekonomian, investasi, pariwisata, pembangunan infrastruktur dan banyak lagi pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2019. Pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam hal monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Provinsi Sumatera Barat.

APBD Sumatera Barat tahun 2019 sebagai penunjang kegiatan pembangunan sebesar Rp. 786.880.160,- yang pekerjaannya meliputi pengendalian pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Pembinaan Lintas Sektor di Provinsi Sumatera Barat dan Pengendalian data pembangunan.

Untuk membantu tugas pengendalian Administrasi Kegiatan ini, Bagian Pembangunan menggunakan Aplikasi Simbangda Berbasis Evidence (SBE). Aplikasi ini akan membantu seluruh SKPD untuk melaporkan realisasi fisik dan keuangannya beserta bukti (evidence) yang mengikuti setiap tahapan pekerjaan yang mereka lakukan.

Untuk mendukung efektifnya aplikasi SBE ini, kami melakukan beberapa tahapan pekerjaan, yakni :

1. Rekon Data Base Program Kegiatan SKPD tahun 2019
2. Rekon Realisasi Triwulan I, II, III dan IV
3. Rapat Evaluasi tingkat Asisten
4. Rapat Evaluasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.

**Tabel 3.3.2.a**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	≥ 90 %	95,37% fisik dan 92,03% keuangan	100,5

Dari tabel 3.3.2.a dapat dilihat capaian kinerja indikator sasaran strategis 2 Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal (≥ 90%) dengan target 90% dan dapat terealisasi 95,37% untuk realisasi fisik dan 92,03% untuk realisasi keuangan, dengan capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 100,5%.

Adapun formula yang digunakan untuk mendapatkan hasil realisasi 90,53% tersebut sebagai berikut :

$$\% \text{ KOEFISIEN TERTIMBANG SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD}}{\text{JUMLAH APBD PROVINSI SUMBAR}}$$

$$\% \text{ JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ANGGARAN SKPD}}{\text{JUMLAH APBD PROVINSI SUMBAR}} \times 100\%$$

$$\% \text{ REALISASI KEUANGAN PEMPROV SUMBAR} = \frac{\sum \% \text{ REALISASI KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}}{\sum \text{SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}}$$

$$\% \text{ REALISASI KEUANGAN SKPD} = \frac{\text{JUMLAH ANGGARAN SKPD YANG DIGUNAKAN}}{\text{JUMLAH ALOKASI ANGGARAN SKPD}} \times 100\%$$

$$\% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU PEMPROV SUMBAR} = \frac{\sum \% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU SKPD SETIAP TRIWULAN}}{4}$$

$$\% \text{ REALISASI KETEPATAN WAKTU} = \frac{\text{KETEPATAN WAKTU SKPD DALAM PENGINPUTAN DATA DI SBE}}{\sum \text{SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV SUMBAR}} \times 100\%$$

Sebagai perbandingan kondisi Capaian indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 antara Tahun 2018 dengan Tahun 2019 pada tabel 3.3.2.b sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2.b**  
**Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**  
**Tahun 2018 dan 2019**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket.
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Rata-rata tertimbang realisasi fisik di atas rata-rata	NA	90	90	98,33	90,53	109,25	100,5	
	Rata-rata 2019						109,25	100,5	
	Kriteria Penilaian		Sangat Berhasil						

\* Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan

Untuk tabel 3.3.2.b hasil perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 terdapat penurunan angka capaian kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan capaian kinerja yang diharapkan tidak terwujud dengan maksimal.

Sebagai penunjang kegiatan pembangunan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau didukung dengan anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Pengendalian Data dan Informasi			
1	Pengendalian data dan Informasi Pembangunan	Rp. 351.799.160,-	Rp. 330.389.616,-	93,91
	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemda			
1	Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Rp. 289.964.840,-	Rp. 270.499.672,-	93,29
2	Pembinaan Kegiatan Lintas Sektor Provinsi Sumatera Barat	Rp. 145.116.160,-	Rp. 122.474.343,-	84,40

### Sasara Strategis 3

#### **MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI**

Tata kelola organisasi pemerintah daerah berdasarkan reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implementasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan

**Tabel 3.3.3.a**

#### **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	95%	96,83%	102

Dari tabel 3.3.3.a dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 102 % dapat diartikan bahwa capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja lebih dari capaian rata-rata yang 100%

Berikut ini dapat dilihat tabel 3.3.3.b tentang perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 3 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.3.b**

#### **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Antara Tahun 2018 dengan Tahun 2019**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RENSTRA	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket.
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	NA	90	95	92,05	96,83	102,3	101,9	
			Rata-rata 2019				102,3	101,9	
	Kriteria Penilaian		Sangat Berhasil						

\* Tidak ada target kinerja nasional yang diamankan

Untuk hasil capaian kinerja sasaran 3 antara tahun 2018 dengan tahun 2019 terjadi penurunan. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya pengurangan kegiatan dan pengurangan anggaran sehingga mempengaruhi hasil capaian kinerja. Walaupun mengalami penurunan nilai hasil capaian kinerja tetapi nilai hasil capaian masih sangat berhasil.

Adapun kegiatan dan anggaran yang pendukung sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Pelayanan Adminisrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 105.007.691,-	Rp. 104.663.622,-	99,67
2	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	Rp. 7.200.000,-	Rp. 7.136.780,-	99,12
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 62.147.000,-	Rp. 61.644.300,-	99,19
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	100
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp. 415.717.763,-	Rp. 414.251.217,-	99,65
6	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 24.752.000,-	Rp. 24.705.000,-	99,81
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 49.091.131,-	Rp. 41.851.192,-	85,25
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.350.000,-	87
	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	100
2	Penatausahaan keuangan SKPD	Rp. 69.500.000,-	Rp. 67.700.000,-	97,41
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 15.950.000,-	Rp. 15.950.000,-	100
4	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Rp. 24.780.000,-	Rp. 24.780.000,-	100

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan capaian target kinerja indikator kinerja dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dalam Perubahan Renstra 2016-2021, dimana tahun 2019 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sebesar Rp. 3.631.907.942,- dan untuk realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.4.1

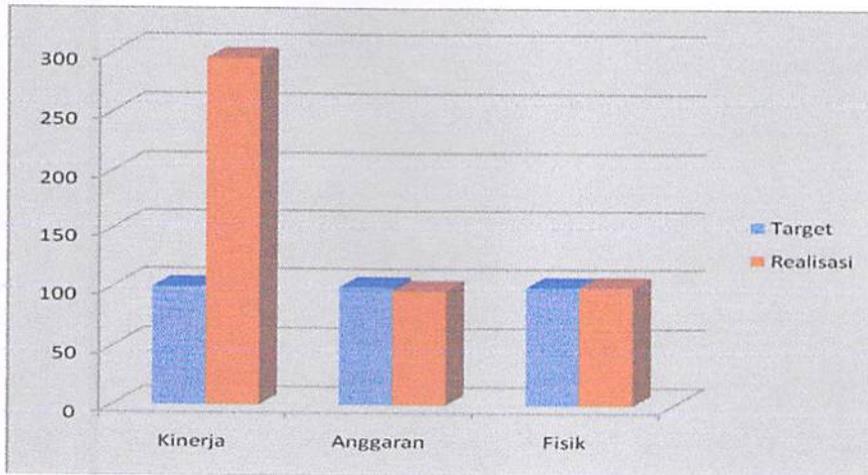
**Tabel 3.4.1**  
**Realisasi Anggaran 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp. 633.824.454,-</b>	<b>Rp. 631.400.919,-</b>	<b>99,61</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 105.007.691,-	Rp. 104.663.622,-	99,67
2	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	Rp. 7.200.000,-	Rp. 7.136.780,-	99,12
3	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 62.147.000,-	Rp. 61.644.300,-	99,19
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	100
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp. 415.717.763,-	Rp. 414.251.217,-	99,65
6	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 24.752.000,-	Rp. 24.705.000,-	99,81
<b>II</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Rp. 54.091.131,-</b>	<b>Rp. 46.201.192,-</b>	<b>85,41</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 49.091.131,-	Rp. 41.851.192,-	85,25
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.350.000,-	87
<b>III</b>	<b>Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Rp. 120.230.000,-</b>	<b>Rp. 118.430.000,-</b>	<b>98,50</b>
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	100
2	Penatausahaan keuangan SKPD	Rp. 69.500.000,-	Rp. 67.700.000,-	97,41
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 15.950.000,-	Rp. 15.950.000,-	100
4	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Rp. 24.780.000,-	Rp. 24.780.000,-	100
<b>IV</b>	<b>Pengendalian Data dan Informasi</b>	<b>Rp. 351.799.160,-</b>	<b>Rp. 330.389.616,-</b>	<b>93,91</b>

1	Pengendalian data dan Informasi Pembangunan	Rp. 351.799.160,-	Rp. 330.389.616,-	93,91
<b>V</b>	<b>Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Rp. 2.036.882.197,-</b>	<b>Rp. 1.997.596.840,-</b>	<b>98,07</b>
1	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	Rp. 363.316.980,-	Rp. 343.545.247,-	94,56
2	Kerjasama Pihak Ketiga	Rp. 157.980.060,-	Rp. 157.121.498,-	99,46
3	Monitting Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Rp. 941.144.880,-	Rp. 933.469.115,-	99,18
4	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	Rp. 370.828.748,-	Rp. 366.802.734,-	98,91
5	Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau	Rp. 203.611.529,-	Rp. 196.658.246,-	96,59
	Kerjasama Pembangunan			
1	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	Rp. 363.316.980,-	Rp. 343.545.247,-	94,56
2	Kerjasama Pihak Ketiga	Rp. 157.980.060,-	Rp. 157.121.498,-	99,46
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemda</b>	<b>Rp. 435.081.000,-</b>	<b>Rp. 392.974.015,-</b>	<b>90,32</b>
1	Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Rp. 289.964.840,-	Rp. 270.499.672,-	93,29
2	Pembinaan Kegiatan Lintas Sektor Provinsi Sumatera Barat	Rp. 145.116.160,-	Rp. 122.474.343,-	84,40

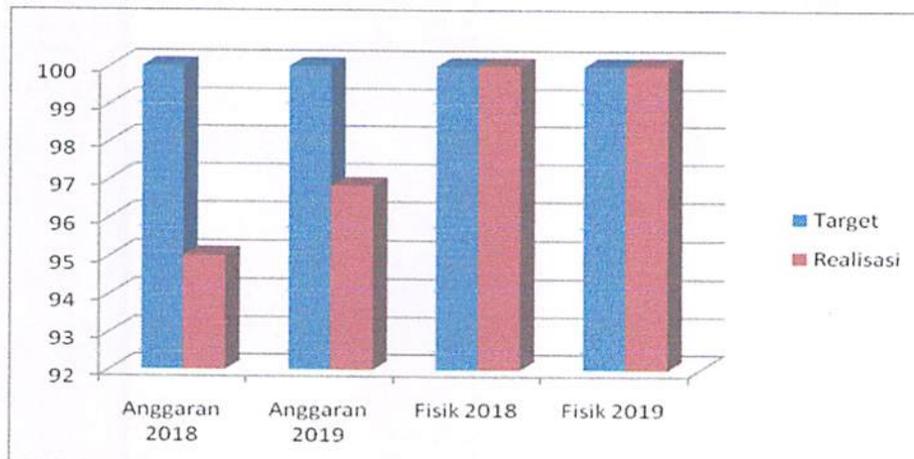
Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat bahwa total anggaran Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tahun 2019 sebesar Rp. 3.631.907.942,- terealisasikan sebesar Rp. 3.516.828.582,- dengan persentase 96,83%, artinya terdapat sisa anggaran sebesar 3,17%. Adapun sisa anggaran disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran dari tingkat capaian indikator kinerja dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pagu anggaran dan realisasi fisik selanjutnya dapat dilihat pada grafik 1 (satu) dibawah ini :

**Grafik 3.1**



Berdasarkan kepada tingkat realisasi anggaran 2018 dan realisasi fisik 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 2 ( dua) dibawah ini :

**Grafik 3.2**



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara keseluruhan dapat disimpulkan pencapaian kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tahun 2019 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Perubahan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau 2016-2021. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barattahun 2019 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian sebesar 295%.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2019. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran startegis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
3. Pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan baik dalam capaian sasaran kinerja sebesar 295%, realisasi keuangan sebesar 96,83% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

## 4.2 Permasalahan dan Kendala

Pencapaian kinerja pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau menunjukkan perkembangan yang baik dan lebih meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

1. Bagian Rantau
  - a. Hampir di seluruh Kabupaten/Kota tidak mempunyai pejabat struktural untuk menangani perantau dan keterbatasan SDM di Kabupaten/Kota dan tidak tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.
  - b. Regulasi yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan rantau juga belum memadai.
  
2. Bagian Pembangunan
  - a. Pembangunan aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) bersamaan dengan pelaksanaan tugas monev pembangunan yang mesti dengan aplikasi yang baru dibangun (build by running). Oleh sebab itu proses pembangunan aplikasi menjadi terdesak dan perlu di upgrade secara simultan sepanjang tahun sesuai kendala yang dihadapi.
  - b. Aplikasi SBE jauh berbeda dari Simbangda sebelumnya dimana SBE menghendaki evidence dan proses validasi, sementara simbangda sebelumnya tidak
  - c. Website biro yang lama sudah dinon aktifkan sementara wibesite baru, baru akan dibangun di tahun 2018 dan menjadi target yang harus diselesaikan di tahun 2018
  - d. Kapasitas Server kurang memadai dan pengelolaan server tergantung kepada Bappeda karena server berada di Bappeda
  - e. Basis data aplikasi Pemprov Sumbar tidak satu sehingga sulit menyediakan aplikasi SBE yang mudah diakses

- f. SKPD belum terbiasa untuk berkoordinasi dengan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sehingga pengendalian permasalahan kegiatan masih terpencar-pencar di beberapa SKPD
  - g. Pendanaan yang masih kurang khususnya dalam mendukung koordinasi kegiatan baik dalam rapat koordinasi.
3. Bagian Kerjasama Antar Daerah
- a. Sebanyak 169 rekomendasi luar negeri yang dikeluarkan bagi OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih banyak yang belum menyampaikan laporan perjalanan dinas ke Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Sekretariat Negara RI
  - b. Belum tergalinya potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga daerah belum mengenal sejauh mana kemampuan daerahnya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga juga berdampak terhadap belum diseluruh Kabupaten/Kota mempunyai pejabat struktural untuk menangani kerjasama daerah.
  - c. Masih belum adanya peraturan teknis ( Permendagri Baru turunan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, sehingga dalam pelaksanaan masih terdapat tumpang tindih dalam mencari acuan regulasi.
  - d. Egoisme kedaerah yang selalu ingin mendominasi dan merasa sebagai daerah yang lebih ingin mendominasi sebagai daerah yang lebih superior dan beranggapan tidak perlu kerjasama dengan daerah lain.